

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Setiap negara memiliki pusat pemerintahan dan pemerintahan daerah yang membutuhkan tata kelola yang efektif dan bertanggung jawab. Kunci agar kebijakan dapat berhasil dalam skala besar adalah praktik tata kelola. Hal ini harus tertanam dalam pengaturan kelembagaan yang ada atau yang baru. Seperti tata kelola berbagi data, terutama pada sektor publik (Klievink & Janssen, 2014). Saat ini, ada peningkatan perhatian yang signifikan terhadap penilaian efektivitas manajemen pemerintahan dalam akuntansi sektor publik. Fokusnya mencakup peningkatan sistem akuntansi manajemen, keuangan, perencanaan keuangan dan pembangunan, pengawasan, pemeriksaan, dan implikasi finansial dari kebijakan pemerintah (Mardiasmo, 2009).

Pemerintah sebagai entitas sektor publik juga memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam mencapai hal tersebut, masyarakat menetapkan norma-norma umum, seperti konstitusi dan Pemerintah harus mematuhi peraturan perundang-undangan, yang menjadi tuntutan masyarakat dan membuat Sistem Informasi Pemerintahan Daerah menjadi krusial. Semakin besar alokasi dana yang dikelola oleh pemerintah, semakin besar pula tuntutan untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan sebagai bentuk transparansi dalam pemerintahan (Nordiawan et al., 2008). Salah satu kebijakan pemerintah Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia termanifestasi melalui implementasi sistem informasi pemerintah yang

bertanggung jawab (Lawita, 2020). Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi dalam menyampaikan informasi keuangan pemerintahan harus mendukung akuntabilitas keuangan pemerintah agar pengelolaan data menjadi lebih mudah.

Penting bagi sistem tata kelola pemerintah untuk mengintegrasikan teknologi informasi agar memudahkan akses, pengelolaan, dan pemanfaatan informasi dengan cepat dan akurat. Dengan demikian, untuk menghasilkan tata kelola yang baik dalam alokasi sumber daya keuangan pemerintah yang efektif dan lebih efisiensi, memerlukan aliran yang tepat serta akurat diseluruh manajemen sektor pemerintahan (Ramayanto & Reinelda Tri Yunarni, 2022).

Pemanfaatan teknologi informasi di pemerintah daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah. Contoh pemanfaatannya adalah dalam pengelolaan keuangan dan perencanaan daerah, di mana teknologi sangat penting dalam mengelola pemerintahan. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), sebagai inovasi Kementerian Dalam Negeri yang diatur melalui Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, mulai berlaku sejak 27 September 2019 untuk menggantikan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Perubahan ini dimaksudkan untuk mencakup informasi pembangunan, keuangan, dan pemerintahan daerah dalam satu sistem yang terhubung (Kementerian Dalam Negeri, 2019).

Sistem ini diperkenalkan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai platform terkomputerisasi yang dirancang untuk proses dokumentasi, administrasi, dan pengelolaan data pada pembangunan daerah agar menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat serta digunakan sebagai bahan dalam

pengambilan keputusan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah (Putri, 2021). Langkah ini penting untuk menghasilkan informasi keuangan yang terintegrasi dan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Laporan keuangan sebuah organisasi sektor publik mencatat transaksi-transaksi yang dilakukannya, yang menjadi alat pertanggungjawaban aktivitasnya kepada publik. Selain itu, laporan keuangan juga berfungsi sebagai sumber informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan mengevaluasi kinerja pemerintahan (Akbariah & Suratno, 2018). Dengan demikian, nilai dari informasi yang disajikan sangat penting agar laporan keuangan dapat memberikan manfaat kepada para pengguna. Kebermaknaan sebuah laporan akan mencerminkan nilai informasinya yang menandakan kualitas dari laporan keuangan tersebut.

Pemerintah dalam membangun laporan keuangan yang memiliki kualitas tinggi, diperlukan implementasi sistem pengendalian internal yang mampu mencegah timbulnya masalah akibat pengawasan yang kurang efektif serta kurangnya kontrol. Sistem Pengendalian Intern (SPI) menjadi kunci dalam menentukan standar kualitas laporan keuangan. Kualitas sistem pengendalian internal tercermin dalam beberapa aspek, termasuk keberadaan sistem dan prosedur akuntansi, adopsi sistem otorisasi, penerapan pemisahan tugas, dan implementasi sistem formulir, dokumen, serta catatan. Semua elemen ini mendukung fungsi keuangan organisasi dalam menghasilkan laporan keuangan yang handal. Semakin efektif sistem pengendalian internal yang digunakan,

semakin meningkat kemampuan organisasi untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya (Triono & Dewi, 2020).

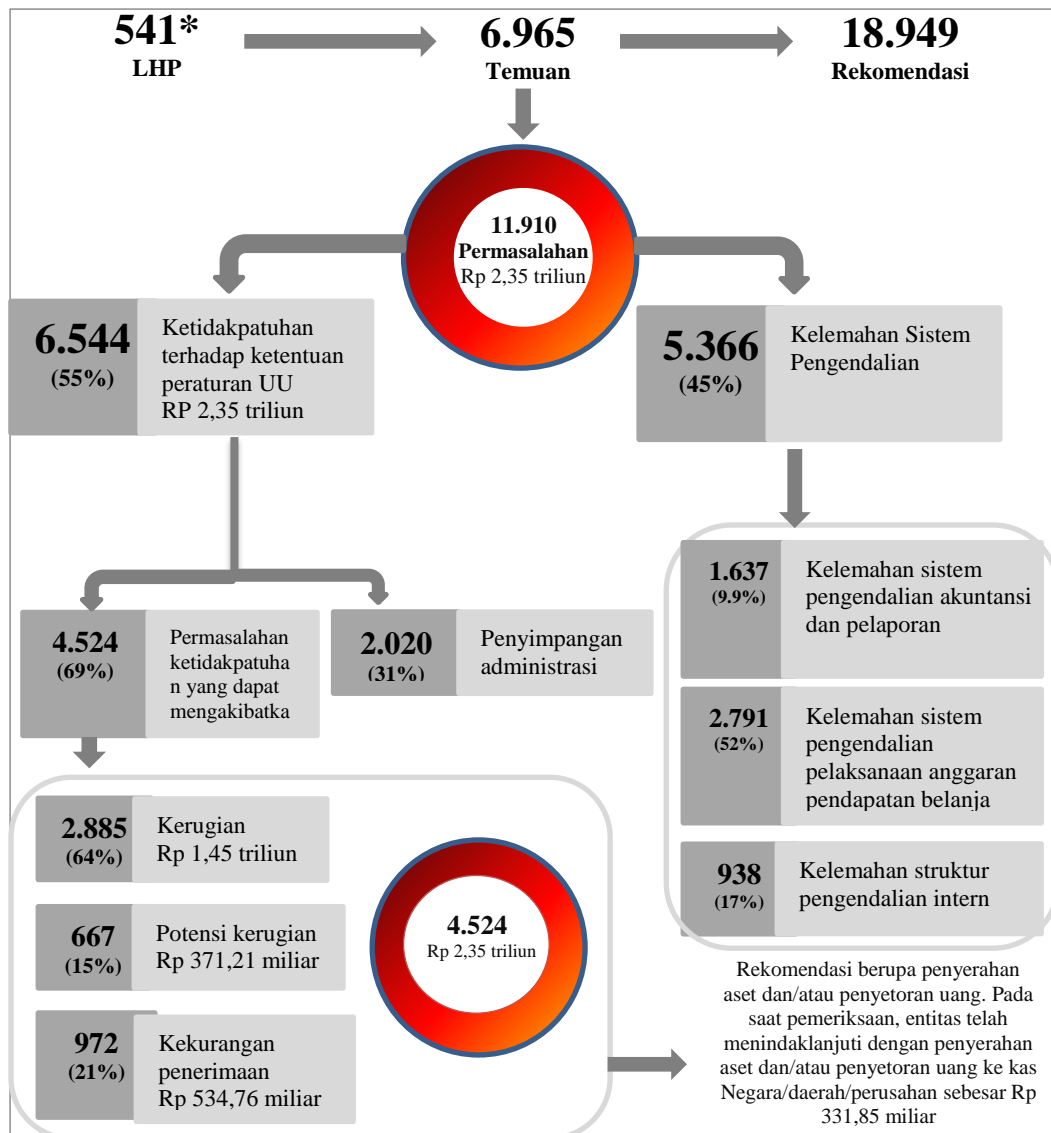
Keberadaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang dikenal sebagai SPIP, sangat penting untuk memastikan manajemen yang efektif dalam pelaksanaan program dan aktivitas pemerintah sehingga dapat berjalan dengan lancar dan efisien. SPIP dirancang dengan tujuan memastikan bahwa administrasi negara, pelaporan keuangan, perlindungan aset, dan kepatuhan hukum diurus dengan efisien dan efektif (A. Putri & H. Simanjuntak, 2023). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Hukum Federal, standar laporan keuangan dinyatakan sebagai langkah-langkah yang harus diambil dalam penghasilan informasi keuangan agar mencapai tujuannya. Keempat karakteristik ini sangat penting untuk memastikan bahwa informasi keuangan pemerintah dapat memenuhi persyaratan, termasuk relevansi, keandalan, keterbandingan yang konsisten, dan kejelasan.

Pengendalian internal di pemerintah daerah dan pemerintah pusat disusun sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sehingga penerapan sistem pengendalian intern dapat meningkatkan kehandalan dan objektivitas informasi, mencegah inkonsistensi, dan mempermudah proses audit laporan keuangan (Wulandari & Octaviani, 2020). Kualitas laporan keuangan dapat dipengaruhi secara besar oleh kurangnya implementasi sistem pengendalian internal yang memadai. Oleh karena itu, pentingnya sistem pengendalian internal

sangat ditekankan untuk menjamin kualitas laporan keuangan tetap optimal (Manalu & Novita, 2021).

Hubungan erat antara kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang memiliki otoritas dalam melakukan audit pada pemerintah daerah. Sejak diberlakukannya Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Berbasis Akrua pada tahun 2015, dari tahun 2016 hingga 2020, tidak semua pemerintah daerah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK. Dari perspektif positif, terdapat kemajuan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pada tahun 2016, sebanyak 70% laporan keuangan pemerintah daerah mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari BPK, dan angka tersebut meningkat menjadi 90% pada tahun 2020 (BPK RI, 2021). Namun demikian, ada pemerintah daerah yang belum berhasil memperoleh opini tersebut. Hal ini mencerminkan bahwa masih ada kekurangan dalam penyajian laporan keuangan.

Laporan keuangan pemerintah daerah yang tidak mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian disebabkan oleh kurangnya bukti yang memadai untuk mendukung kepatutan laporan keuangan tersebut (Firmansyah et al., 2022). Selain memberikan opini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga mengungkapkan temuan dari pemeriksaannya dan memberikan saran untuk memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di pemerintah daerah. Adapun hasil pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2022 menunjukkan jumlah dan nilai temuan, serta rekomendasi pada LHP LKPD tahun 2021 terdapat pada Gambar 1.1 sebagai berikut:



Sumber: <https://www.bpk.go.id> diakses 16 desember 2023

Gambar 1.1

### Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2022

Pemeriksaan BPK RI terhadap 541 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk tahun 2021 mengungkapkan 6.965 temuan, termasuk 11.910 isu terkait kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, yang disebut sebagai ketidakpatuhan.

Temuan tersebut mencakup 5.366 kelemahan dalam SPI dan 6.544 pelanggaran ketidakpatuhan senilai Rp2,35 triliun.

Dari hasil pemeriksaan, terdapat 5.366 isu terkait kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern (SPI), yang terdiri dari 1.637 (31%) isu terkait kelemahan dalam sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 2.791 (52%) isu terkait kelemahan dalam sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 938 (17%) isu terkait kelemahan dalam struktur pengendalian internal.

Pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini mengenai keadaan keuangan tersebut, yang merupakan evaluasi profesional yang mencerminkan kesimpulan auditor tentang kecukupan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada entitas tersebut. Opini tersebut didasarkan pada penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pengungkapan yang memadai, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal (BPK Riau, 2023). Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**  
**Kabupaten Rokan Hulu**

No	LKPD Tahun Anggaran	Tahun Pemeriksaan	Hasil Opini
1.	LKPD Tahun 2013	2014	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2.	LKPD Tahun 2014	2015	Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraph Penjelasan (WTP-DPP)
3.	LKPD Tahun 2015	2016	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
4.	LKPD Tahun 2016	2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
5.	LKPD Tahun 2017	2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
6.	LKPD Tahun 2018	2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
7.	LKPD Tahun 2019	2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
8.	LKPD Tahun 2020	2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
9.	LKPD Tahun 2021	2022	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
10.	LKPD Tahun 2022	2023	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber : <https://Riau.Bpk.Go.Id/Lhp-Lkpd/Hasil-Pemeriksaan-Lkpd-Kabupaten-Rokan-Hulu/> diakses 16 desember 2023

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2016 hingga 2022, yang terdokumentasikan dalam Data Laporan Hasil Pemeriksaan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Rokan Hulu. Pada tahun 2015, sebelumnya, LKPD Kabupaten Rokan Hulu mendapat Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Opini Wajar Dengan Pengecualian diberikan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari kesalahan material, kecuali pada beberapa item tertentu yang dikecualikan. Sementara itu, Opini Wajar Tanpa Pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa secara menyeluruh dan material menggambarkan dengan wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Hasil Hasil pemeriksaan BPK tidak hanya dilaporkan kepada DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), tetapi juga kepada Bupati untuk segera direspons dan dijadikan dasar untuk perbaikan, peningkatan kinerja, serta pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah (BPK Riau, 2023). Beberapa aspek yang perlu diperhatikan meliputi:

a. Penyertaan modal pada Perusahaan Umum Daerah Rokan Hulu belum memberikan hasil optimal, sehingga belum memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan daerah. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu pada PT Riau Airlines dan PT Bank Kepri-Riau masih di bawah 20%, yang belum memenuhi standar optimal.

b. Tidak memadainya penatausahaan, pengamanan, dan pemanfaatan Aset Tetap. Pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu disebutkan bahwa pemanfaatan Aset Tetap Tanah belum ditetapkan status penggunaannya, sehingga data Barang Milik Daerah dalam Keterangan Informasi Barang (KIB) belum sepenuhnya akurat dan informatif, berpotensi menimbulkan risiko penyalahgunaan dan tidak memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan daerah.

Sebagian besar organisasi memiliki tugas-tugas kompleks yang membutuhkan kerjasama banyak individu (Berghout, 2020). Penggunaan sistem informasi akuntansi yang kurang memadai dapat mengganggu proses transaksi dan menghasilkan informasi akuntansi yang tidak akurat. Kualitas informasi yang buruk dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan.

Ketidapercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat timbul akibat rendahnya kualitas laporan keuangan. Pemerintah daerah, sebagai perwakilan masyarakat dalam menjalankan pemerintahan, memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan keuangan secara akuntabel dan transparan (Firmansyah et al., 2022). Ketidakefektifan dalam proses input data, yang dapat mengakibatkan potensi kesalahan atau keterlambatan dalam informasi keuangan, merupakan salah satu penyebab rendahnya kualitas laporan keuangan. Selain itu, kurangnya integritas sistem juga dapat menyulitkan akses data secara menyeluruh dan secara real-time, yang juga berkontribusi pada rendahnya kualitas laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Dela Alfani & Jualiana Nasution., 2022) menemukan bahwa penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) berbasis online pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara mempermudah proses perencanaan dan penganggaran. Implementasi SIPD oleh Dinas tersebut telah menciptakan informasi dan data yang lebih baik serta lebih cepat. Selain itu, penelitian oleh (Tumija, Asep Hendra & Marja Sinurat., 2023), menunjukkan bahwa Penerapan SIPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, telah berhasil. Keberhasilan ini dapat dilihat dari empat dimensi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Penelitian yang dilakukan oleh (Anggadini et al., 2021), menyimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Internal memiliki dampak signifikan terhadap

kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat. Ini mengindikasikan bahwa semakin baik implementasi sistem pengendalian internal, semakin meningkat pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Penelitian lain oleh (Idawati & Eleonora, 2020), menemukan bahwa akuntabilitas publik secara signifikan berkaitan dengan kualitas laporan keuangan. Keterkaitan erat antara akuntabilitas publik dan transparansi telah meningkatkan informasi keuangan, menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas memiliki dampak langsung terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berkeinginan untuk mendalami Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIPD), pengendalian internal pada laporan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul “**Analisis Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Pengendalian Internal Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu)**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah menganalisis bagaimana Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Pengendalian Internal Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk Menganalisis Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Pengendalian Internal Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Penulis berharap penelitian yang diangkat dapat memberikan pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang laporan keuangan pemerintah daerah di Kantor BPKAD dan pengendalian internal di Kantor Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat praktis bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian ini, diantaranya:

- a. Bagi Instansi Pemerintah

Manfaat penelitian bagi instansi pemerintah daerah diharapkan dapat membentuk instansi pemerintahan yang lebih baik dalam mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Pengendalian Internal pada laporan keuangan pemerintah daerah

- b. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini peneliti mempunyai kesempatan untuk menambah wawasan dan pengalaman tentang fokus penelitian yang diangkat serta

mengembangkan keahlian peneliti dalam manajemen keuangan sesuai dengan konsentrasi jurusan.

c. Bagi pembaca

Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan untuk bahan informasi dan acuan bagi penelitian yang akan datang. Penulis juga berharap penelitian ini nantinya mampu membuka peluang kemungkinan untuk penelitian selanjutnya secara lebih mendalam tentang permasalahan yang sama.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini, dibuatlah sistematika penulisan dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dalam pemahaman dan memberikan gambaran secara umum kepada pembaca mengenai skripsi ini. Adapun Sistematika penulisan dalam skripsi ini dijelaskan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan diadakannya penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini memuat tentang teori-teori dasar yang mendukung pokok-pokok masalah yang diambil dalam skripsi yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan pengendalian internal pada laporan keuangan pemerintah daerah

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas mengenai objek penelitian (tempat dan alamat penelitian), waktu pelaksanaan, informan penelitian, jenis penelitian

dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional, instrument penelitian dan teknik analisis data.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini peneliti membahas tentang gambaran umum objek penelitian, karakteristik informan, analisis data penelitian, dan pembahasan terkait implementasi SIPD dan pengendalian internal.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

#### **LAMPIRAN**

Bagian ini berisi informasi pendukung yaitu dokumentasi kegiatan penelitian

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Landasan Teori**

Pada penelitian ini, teori Implementasi dari George C. Edward III dijadikan rujukan untuk pelaksanaan penelitian. Ada dua jenis model implementasi kebijakan publik yang dikenalkan Edward III, yaitu implementasi langsung dan implementasi tidak langsung. Menurut Edward III, ada empat faktor kunci yang sangat penting dalam menentukan kesuksesan suatu kebijakan.

Faktor pertama adalah komunikasi, yang dianggap krusial dalam mencapai tujuan implementasi kebijakan publik. Keberhasilan implementasi dapat terjadi jika para pengambil keputusan memiliki pemahaman yang jelas tentang tugas yang harus dilaksanakan. Ini bisa dicapai melalui komunikasi efektif, di mana setiap keputusan dan aturan dikomunikasikan dengan baik kepada semua pihak terlibat. Untuk menilai keberhasilan komunikasi, terdapat tiga aspek penting: transmisi informasi, kejelasan pesan, dan konsistensi dalam penyampaian.

Faktor kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah sumber daya. Edward III mengidentifikasi sumber daya sebagai elemen kunci dalam implementasi kebijakan, termasuk staf, informasi, wewenang, dan fasilitas fisik.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan publik adalah disposisi atau sikap dari para pelaksana kebijakan. Hal ini dianggap krusial dalam memastikan efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan publik. Aspek-

aspek yang perlu dipertimbangkan dalam variabel disposisi meliputi penunjukan birokrat dan insentif yang diberikan kepada mereka.

Faktor keempat yang berpengaruh pada keberhasilan implementasi kebijakan adalah struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang tidak mendukung dapat menjadi hambatan bagi jalannya kebijakan, meskipun sumber daya dan disposisi dari pelaksana kebijakan sudah tersedia. Oleh sebab itu, penting bagi birokrasi untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan secara politik melalui koordinasi yang efektif (Dione & Faradina, 2020).

### **2.1.1 Akuntansi Sektor Publik**

Akuntansi sektor publik merupakan sistem yang digunakan oleh organisasi dalam ranah publik untuk mengkomunikasikan dan melaporkan aktivitas keuangan kepada masyarakat. Proses akuntansi sektor publik mencakup pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan oleh lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dengan tujuan mendukung pengambilan keputusan ekonomi yang menguntungkan semua pihak (Nevi Costari & Putri Ariella Belinda, 2021).

Akuntansi sektor publik memiliki hubungan yang erat dengan praktik dan standar akuntansi yang diterapkan dalam lingkup publik. Lingkup publik memiliki cakupan yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Kompleksitas ini tidak hanya disebabkan oleh berbagai jenis dan bentuk organisasi di dalamnya, tetapi juga oleh faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut. Secara institusional, lingkup publik mencakup berbagai entitas seperti badan pemerintahan (baik di tingkat

pusat maupun daerah, serta unit-unit kerja pemerintah), perusahaan milik negara (BUMN dan BUMD), yayasan, organisasi politik dan sosial, perguruan tinggi, dan organisasi nirlaba lainnya. (Mardiasmo, 2009).

Tujuan utama dari akuntansi sektor publik adalah menyediakan informasi yang diperlukan untuk mengelola kegiatan dengan tepat, efisien, dan hemat, serta untuk mengalokasikan sumber daya dengan baik di dalam organisasi. Informasi yang dihasilkan juga digunakan untuk memberikan transparansi kepada masyarakat, memungkinkan manajer untuk mempertanggungjawabkan kinerja mereka, mengelola program dan sumber daya sesuai dengan kewenangan mereka, dan memfasilitasi pelaporan kinerja pemerintah dan penggunaan dana publik secara terbuka oleh pegawai pemerintah (Mardiasmo, 2009).

#### **2.1.1.1 Standar Akuntansi Sektor Publik**

Standar akuntansi adalah aturan atau prinsip-prinsip yang mengatur cara laporan keuangan disusun, dengan tujuan memberikan informasi kepada para pengguna laporan keuangan. Sebaliknya, prosedur akuntansi merujuk pada langkah-langkah khusus yang digunakan untuk menerapkan standar tersebut. Dalam memastikan kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan, sistem akuntansi sektor publik harus dilengkapi dengan pengendalian internal yang mengatur penerimaan dan pengeluaran dana publik (Mardiasmo, 2009).

Standar akuntansi memiliki peranan penting dalam menjaga konsistensi dalam penyajian informasi keuangan. Ketidakadaan standar akuntansi yang memadai dapat mengakibatkan beberapa konsekuensi negatif, seperti rendahnya keandalan dan objektivitas informasi yang disajikan, inkonsistensi dalam

penyajian laporan keuangan, serta menghambat proses audit. Terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan standar akuntansi, antara lain:

- a. Standar ini mengatur jenis informasi yang harus disajikan dalam laporan keuangan mengenai posisi keuangan, kinerja, dan aktivitas suatu organisasi untuk semua pengguna informasi.
- b. Standar memberikan pedoman dan peraturan kepada auditor, memungkinkan mereka untuk melakukan pemeriksaan yang teliti dan independen dengan menggunakan pengetahuan dan integritas mereka dalam mengaudit laporan organisasi dan memverifikasi keabsahan informasinya.
- c. Standar memberikan panduan tentang data yang harus dilaporkan terkait berbagai variabel yang relevan dalam bidang perpajakan, regulasi, perencanaan ekonomi, peningkatan efisiensi ekonomi, dan tujuan sosial lainnya.
- d. Standar mengembangkan prinsip-prinsip dan teori yang penting bagi semua pihak yang terlibat dalam proses akuntansi.

#### **2.1.1.2 Pencatatan Akuntansi Sektor Publik**

Ada beberapa metode atau pendekatan pencatatan akuntansi yang lazim digunakan dalam akuntansi sektor publik:

- a. Akuntansi Anggaran (*Budgetary Accounting*)

Akuntansi anggaran merupakan proses pencatatan yang mengatur pengelolaan distribusi anggaran dan interpretasi pendapatan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD). Tujuan utamanya adalah untuk mengawasi pelaksanaan anggaran, menyediakan informasi yang mendukung pengawasan dan evaluasi anggaran, serta memberikan gambaran tentang realisasi penyerapan anggaran, efisiensi, dan kondisi keuangan pemerintah dalam pengelolaan anggaran (Nevi Costari & Putri Ariella Belinda, 2021).

b. Akuntansi Kas (*Cash Accounting*)

Akuntansi kas adalah metode pencatatan yang sudah lama digunakan dan masih umum di sektor publik serta organisasi nirlaba. Pada metode ini, transaksi pendapatan dan pembayaran dicatat segera setelah terjadi, dan saldo kas dicatat secara terperinci dalam buku kas. (Nevi Costari & Putri Ariella Belinda, 2021). Kelebihan akuntansi kas adalah mencerminkan pengeluaran yang actual, riil, dan objektif (Mardiasmo, 2009)

c. Akuntansi Akrual (*Accrual Accounting*)

Akuntansi akrual adalah metode pencatatan yang banyak digunakan dalam organisasi bisnis dan semakin banyak diterapkan dalam sektor publik dan organisasi nirlaba. Tujuan penerapannya di sektor publik berbeda dengan di sektor bisnis, namun penggunaan akuntansi akrual di sektor publik membantu menetapkan biaya jasa dan harga jasa, serta menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, akurat, dan relevan (Mardiasmo, 2009).

d. Akuntansi Komitmen (*Commitment Accounting*)

Akuntansi komitmen mencatat transaksi lebih awal dibandingkan dengan akuntansi akrual dan kas. Transaksi diakui saat pesanan dikeluarkan untuk pembelian barang atau jasa, atau saat kontrak kerja dibuat. Tujuannya adalah

untuk memantau dan mengelola kewajiban yang akan datang (Nevi Costari & Putri Ariella Belinda, 2021).

e. Akuntansi Dana (*Fund Accounting*).

Penerapan akuntansi dana dalam konteks akuntansi pemerintahan di Indonesia dimungkinkan karena sistem penganggaran pemerintah mencakup beberapa program khusus yang membutuhkan pelacakan dana secara terpisah. Dalam hal ini, akuntansi dana mengelompokkan sumber daya ke dalam berbagai jenis dana untuk manajemen dan pertanggungjawaban yang terpisah. Tujuannya adalah untuk mengatur sumber daya, menentukan posisi keuangan, merencanakan anggaran, dan mengevaluasi kinerja dana secara individual sesuai dengan kebutuhan program-program tertentu (Mardiasmo, 2009).

### **2.1.1.3 Perbedaan Sektor Publik dan Sektor Swasta**

Perbedaan dalam sifat dan karakteristik antara sektor publik dan sektor swasta dapat dilihat dengan membandingkan beberapa aspek berikut:

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan Sifat dan Karakteristik Organisasi Sektor Publik dan Sektor Swasta**

Perbedaan	Sektor Publik	Sektor Swasta
Tujuan organisasi	<i>Nonprofit motive</i>	<i>Profit motive</i>
Sumber pendanaan	Pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN/BUMD, penjualan aset negara, dll	Pembiayaan internal: modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva Pembiayaan eksternal: utang bank, obligasi, penerbitan saham
Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban kepada masyarakat atau publik dan parlemen (DPR/DPRD)	Pertanggungjawaban kepada pemegang saham atau kreditor
Struktur organisasi	Birokratis, rigid, hierarkis	Fleksibel: datar, piramidal, lintas fungsional, dll.
Karakteristik anggaran	Terbuka untuk publik	Tertutup untuk publik
Sistem akuntansi	<i>Cash accounting</i>	<i>Accrual accounting</i>

*Sumber: (Mardiasmo, 2009) diakses 10 maret 2024*

### 2.1.2 Sistem Informasi

Definisi sistem, seperti yang diungkapkan oleh Jugiyanto (2005), adalah suatu rangkaian prosedur yang saling terkait, yang bekerja bersama untuk melakukan aktivitas tertentu atau mencapai tujuan tertentu. Mc Fadden, sebagaimana dikutip oleh Abdul Kadir (1997), mendefinisikan informasi sebagai data yang telah diolah sedemikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan pengguna data tersebut.

Istilah "sistem informasi" sering digunakan secara luas untuk merujuk pada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Ini mencerminkan kombinasi antara teknologi dan aktivitas manusia yang menggunakan teknologi tersebut untuk mendukung operasi dan manajemen.

Tujuan utama sistem informasi adalah menghasilkan informasi yang berguna bagi para penggunanya. Namun, informasi yang dihasilkan haruslah tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat nilai agar benar-benar bermanfaat bagi para pengguna (Alfani & Nasution, 2022).

Sejak dekade 1960-an, bidang Sistem Informasi mengalami perkembangan signifikan. Secara umum, Sistem Informasi adalah suatu sistem yang menyediakan informasi untuk mendukung operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Konsep ini mencakup pengumpulan, pemrosesan, dan penghasilan informasi yang relevan untuk keperluan manajerial organisasi. Tujuannya melibatkan penyediaan informasi untuk perhitungan harga pokok jasa, produk, perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan mendukung proses pengambilan keputusan. Pendekatan ini berlandaskan pada prinsip sistem, di mana berbagai bentuk informasi dikumpulkan, disimpan, diolah, dan diproses oleh entitas tunggal untuk membentuk suatu informasi yang berguna (Rusdiana & Irfan, 2014).

Sistem informasi memiliki tujuan melibatkan penyediaan informasi untuk perhitungan harga pokok jasa, produk, dan pencapaian tujuan manajemen lainnya. Selain itu, tujuan sistem ini mencakup penyediaan informasi yang digunakan dalam kegiatan perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan. Sistem ini juga dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan guna mendukung proses pengambilan keputusan. Dengan kata lain, secara lebih simpel, sistem informasi beroperasi dengan mengolah data dan mengubahnya menjadi informasi yang memiliki relevansi. O'Brien & Marakas (2010), sistem informasi

dijelaskan sebagai kombinasi teratur antara orang, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan informasi di dalam organisasi.

### **2.1.3 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)**

Kebutuhan akan sistem informasi keuangan dimulai dari subsistem input, yang mencakup sistem informasi akuntansi, pemeriksaan internal, dan penyelidikan keuangan. Ketiga elemen ini berperan sebagai sumber data internal organisasi dan lingkungannya. Data dari pangkalan data tersebut kemudian diolah menjadi subsistem output, yang digunakan untuk merencanakan alokasi anggaran dan menentukan biaya yang diperlukan. Proses ini menjadi landasan bagi pengambilan keputusan keuangan perusahaan. Model ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sistem pendukung keputusan di bidang keuangan, meningkatkan akurasi alokasi anggaran perusahaan, dan meningkatkan efisiensi pengendalian (Rochaety, Eti, 2011).

Manajemen keuangan melibatkan pengambilan keputusan tentang sumber dan penggunaan sumber keuangan di organisasi. Informasi keuangan mencakup data tentang arus uang dalam organisasi, yang mencerminkan semua kegiatan dan keputusan organisasi. Fungsi dan sistem manajemen keuangan dalam menyediakan informasi keuangan menjadi sangat penting, baik untuk perusahaan maupun pemerintahan (Cushing & Kosasih, 1995).

Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIPD) adalah program yang dirancang oleh Kemendagri untuk membenarkan penataan dokumen rencana daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BPKP bertindak sebagai

pengemban amanat pembina pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sesuai PP No 60 Tahun 2008, dalam meningkatkan SIPD dengan mematuhi peraturan perundang-undangan serta aplikasi pengelolaan, perencanaan, dan anggaran berdasarkan Pemendagri Nomor 70 Tahun 2019. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sejak tahun 2020, setelah sebelumnya menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).

#### **2.1.2.1 Tujuan SIPD**

Berdasarkan (Perpres 39/2019 Pasal 2) adapun tujuan penerapan aplikasi SIPD dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Memberikan panduan dan pedoman kepada Instansi Pusat dan Daerah untuk mengelola data yang mendukung langkah-langkah perencanaan, implementasi, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
- b. Menghasilkan data yang akurat, terbaru, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagikan antara Instansi Pusat dan Daerah sebagai landasan untuk perencanaan, implementasi, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
- c. Mempromosikan transparansi dan keterbukaan data untuk mendukung perencanaan serta pembuatan kebijakan pembangunan yang didasarkan pada informasi yang tersedia.
- d. Mendukung penerapan sistem nasional yang terstruktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **2.1.2.2 Manfaat SIPD**

Manfaat yang diperoleh oleh pemerintah daerah melalui penggunaan sistem aplikasi SIPD daerah terintegrasi meliputi:

- a. Peningkatan efisiensi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pemerintahan daerah.
- b. Mendorong kerja sama dan partisipasi dari semua pihak dalam proses perencanaan.
- c. Kemudahan dalam menyediakan informasi kepada pimpinan dan masyarakat karena sistem terintegrasi.
- d. Integrasi SIPD dengan sistem pengadaan barang dan jasa LKPP.

### **2.1.4 Sistem Pengendalian Internal**

Tiap lembaga, terutama di sektor pemerintahan, perlu mengadopsi sistem untuk mengelola operasionalnya. Pemanfaatan sistem yang efektif membantu lembaga tersebut mencegah potensi kecurangan. Sistem pengendalian internal merupakan salah satu sistem yang direkomendasikan untuk perusahaan atau instansi, sebagaimana dijelaskan oleh (Sari, 2022). Fungsi utama dari Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah untuk memberi keyakinan yang memadai dalam memastikan efektivitas dan efisiensi dalam proses akuntansi, terutama untuk menjamin keandalan laporan keuangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal, sistem ini didefinisikan sebagai proses integral dalam kegiatan dan tindakan yang dilaksanakan secara berkesinambungan oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Tujuannya adalah memberikan keyakinan yang memadai

terhadap pencapaian tujuan organisasi melalui pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien, memastikan keandalan laporan keuangan, menjaga keamanan aset negara, serta memastikan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengendalian internal adalah suatu proses yang melibatkan dewan komisaris, manajemen, dan personel lainnya di dalam suatu organisasi, yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai terkait dengan pencapaian tujuan, menurut (Hery, 2014). Menurut Wakhyudi (2018), Pengendalian internal melibatkan serangkaian kebijakan dan prosedur yang disusun untuk melindungi aset atau kekayaan suatu instansi dari berbagai bentuk penyalahgunaan, serta memastikan keakuratan informasi keuangan perusahaan.

Menurut *The Committee of Sponsoring Organizations (COSO) of the Threadway Commission* dalam penelitian oleh (Zamzami et al., 2015), Pengendalian internal adalah suatu proses yang dilakukan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lain di suatu entitas, yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang wajar terkait dengan pencapaian tujuan organisasi dalam (1) efektivitas dan efisiensi operasional, (2) keandalan pelaporan keuangan, dan (3) kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku. Dengan kata lain, pengendalian internal merupakan proses yang dikelola oleh manajemen dan dijalankan oleh seluruh personel di berbagai tingkat organisasi, dengan tujuan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam proses operasional, memastikan keakuratan catatan keuangan, serta mematuhi peraturan yang berlaku.

Sementara itu, menurut penelitian oleh (Arens, Alvin, Elder, J, R., dan Beasley, 2015), internal control didefinisikan sebagai suatu proses yang dirancang

untuk memberikan keyakinan yang memadai terkait dengan pencapaian tujuan dalam kategori keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku. Dengan adanya sistem pengendalian internal, diharapkan bahwa semua ketentuan yang telah ditetapkan dapat diterapkan dengan baik dalam suatu entitas atau organisasi, sehingga penelitian yang efektif dan efisien menjadi sangat penting.

Menurut Mulyadi (2016), tujuan dari pengendalian internal dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Melindungi Kekayaan Organisasi

Kekayaan suatu perusahaan atau organisasi, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, memerlukan perlindungan dari potensi pencurian, penyalahgunaan, atau kerusakan. Pengendalian internal yang memadai diperlukan untuk mencegah risiko tersebut, termasuk dalam menjaga keakuratan catatan keuangan terkait piutang dagang.

b. Memastikan Ketelitian dan Keandalan Data Akuntansi

Data akuntansi yang akurat dan dapat diandalkan sangat penting dalam pengambilan keputusan manajerial. Oleh karena itu, Pengendalian internal dirancang untuk memastikan bahwa proses pengolahan data akuntansi menghasilkan informasi keuangan yang akurat dan dapat dipercaya, karena informasi tersebut mencerminkan perubahan kekayaan perusahaan.

c. Mendorong Efisiensi

Data akuntansi yang akurat dan dapat diandalkan sangat penting dalam pengambilan keputusan manajerial. Oleh karena itu, pengendalian internal

dirancang untuk memastikan bahwa proses pengolahan data akuntansi menghasilkan informasi keuangan yang akurat dan dapat dipercaya, karena informasi tersebut mencerminkan perubahan kekayaan perusahaan.

d. Mendorong Kepatuhan Terhadap Kebijakan Manajemen

Pengendalian internal juga bertujuan untuk mendorong kepatuhan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Hal ini ditujukan untuk memberikan keyakinan sehingga kebijakan yang akan dijalankan agar dapat dipatuhi oleh seluruh karyawan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal, terdapat lima elemen utama yang saling terkait dalam pengendalian internal pemerintah. Elemen-elemen tersebut meliputi Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Komunikasi Informasi, dan Pemantauan Pengendalian Internal. Kelima elemen ini merupakan bagian integral dari proses pengendalian yang dilakukan secara berkesinambungan oleh para pegawai.

**a. Lingkungan Pengendalian**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengenai sistem pengendalian internal, para pemimpin instansi diwajibkan untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang mendorong perilaku positif dan kondusif dalam implementasi sistem pengendalian internal di tempat kerja mereka. Upaya ini melibatkan praktik-praktik seperti penerapan integritas dan nilai etika, kepemimpinan yang mendukung, komitmen terhadap kompetensi, delegasi

wewenang dan tanggung jawab yang sesuai, struktur organisasi yang tepat, kebijakan yang mendukung pengembangan sumber daya manusia, efektivitas aparat pengawasan internal pemerintah, dan hubungan yang baik dengan instansi pemerintah lainnya.

#### **b. Penilaian Risiko**

Penilaian risiko merupakan salah satu komponen dalam Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Dalam konteks ini, penilaian risiko didefinisikan sebagai kegiatan evaluasi terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Ada tiga elemen utama dalam penilaian risiko, yaitu peristiwa yang mungkin terjadi, probabilitas atau kemungkinan terjadinya peristiwa tersebut, serta dampak atau konsekuensi yang mungkin ditimbulkan. Pimpinan instansi pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan penilaian risiko ini, menetapkan tujuan instansi, serta mengevaluasi kemungkinan dan dampak dari peristiwa yang dapat terjadi melalui proses identifikasi dan analisis risiko.

#### **c. Kegiatan Pengendalian**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal, kegiatan pengendalian adalah langkah-langkah yang diperlukan untuk mengelola risiko, serta penetapan dan implementasi kebijakan dan prosedur guna memastikan efektivitas tindakan mitigasi risiko. Secara umum, kegiatan pengendalian melibatkan sebelas aspek yang mencakup berbagai bidang, seperti evaluasi kinerja, pengembangan sumber daya manusia, pengawasan sistem

informasi, pengamanan fisik aset, penetapan dan evaluasi indikator kinerja, pemisahan tugas, otorisasi transaksi dan peristiwa penting, pencatatan transaksi dan peristiwa, pengendalian akses dan pencatatan sumber daya, akuntabilitas atas penggunaan sumber daya, serta dokumentasi sistem pengendalian internal dan transaksi serta peristiwa penting.

#### **d. Informasi Akuntansi**

Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengatur tentang elemen keempat dalam sistem pengendalian internal, yaitu informasi dan komunikasi. Pasal tersebut menekankan pentingnya mengenali, mencatat, dan menyampaikan informasi dengan tepat waktu dan secara efektif dalam implementasi unsur pengendalian internal. Oleh karena itu, instansi diharapkan harus dapat menyediakan dan memanfaatkan berbagai saluran komunikasi yang tepat, serta terus mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara berkelanjutan. Pasal 42 menekankan pentingnya komunikasi informasi yang efektif dalam menjalankan fungsi pengendalian internal., dan pimpinan instansi pemerintah memiliki tanggung jawab minimal untuk:

1. Menyediakan dan menggunakan berbagai bentuk dan sarana komunikasi.
2. Mengelola, mengembangkan, dan terus-menerus memperbarui sistem informasi.

#### **e. Pemantauan Pengendalian Internal**

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengamanatkan bahwa Pemantauan Pengendalian Internal merupakan suatu proses yang digunakan untuk menilai kualitas kinerja sistem pengendalian internal dan memastikan bahwa hasil

dari audit dan evaluasi dapat diambil tindakan lanjut. Pemantauan dilakukan melalui langkah-langkah seperti pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan pelaksanaan tindak lanjut terhadap Rekomendasi Hasil Audit dan Review Lainnya.

### **2.1.5 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut Puspitawati & Anggadini (2011), laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah hasil dari proses pengolahan data keuangan instansi, dimulai dari bukti-bukti transaksi seperti faktur, dokumen, nota, kuitansi, dan bukti lainnya. Informasi ini dicatat dalam buku akuntansi instansi untuk menghasilkan laporan keuangan. Sementara menurut Suwanda (2015), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mencakup data tentang struktur kekayaan dan keuangan, mencerminkan hasil dari suatu kegiatan tertentu.

Tujuan utama penyusunan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi keuangan perusahaan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, sehingga informasi tersebut dapat dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Kualitas dari laporan keuangan sendiri dapat diartikan sebagai informasi yang terungkap di dalam catatan laporan keuangan. Semakin tinggi tingkat pengungkapan informasi, semakin baik pemahaman terhadap kinerja laporan keuangan. Aspek-aspek kualitas laporan keuangan termasuk kelengkapan informasi, ketepatan waktu, keandalan informasi, dan kemampuan untuk dibandingkan (Fransiska et al., 2016).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, suatu laporan dianggap berkualitas jika memenuhi persyaratan standar yang umumnya harus

terpenuhi, sehingga dapat mencapai tujuan informasi yang diinginkan. Terdapat empat karakteristik prasyarat normatif yang esensial agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi standar kualitas yang diharapkan.

a. Relevan

Informasi yang relevan dalam laporan keuangan memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, meramalkan peristiwa masa depan, dan memperkuat evaluasi mereka terhadap peristiwa masa lalu. Oleh karena itu, informasi yang dianggap relevan memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

1. Memberikan Umpan Balik yang Bermakna

Informasi memungkinkan pengguna untuk memverifikasi atau mengoreksi harapan mereka terhadap peristiwa masa lalu.

2. Berperan dalam Ramalan

Informasi memiliki peran penting dalam membantu pengguna meramalkan peristiwa masa depan berdasarkan data historis dan situasi saat ini.

3. Keterkaitan waktu

Informasi disajikan tepat waktu untuk memberikan dampak dan nilai yang optimal dalam proses pengambilan keputusan.

4. Kelengkapan

Informasi keuangan pemerintah disajikan secara komprehensif, mencakup semua aspek akuntansi yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Setiap informasi utama dalam laporan keuangan dijelaskan secara jelas untuk menghindari kesalahan interpretasi.

b. Andal

Keandalan informasi dalam laporan keuangan ditunjukkan oleh ketiadaan interpretasi yang menyesatkan dan kesalahan bahan, serta kemampuannya untuk menyajikan fakta secara jujur dan dapat diverifikasi. Jika informasi relevan namun esensinya atau penyajiannya tidak dapat dipercaya, penggunaan informasi tersebut berpotensi menyesatkan. Ciri-ciri keandalan informasi mencakup:

1. Penyajian Jujur

Informasi dalam laporan keuangan menggambarkan transaksi dan peristiwa lainnya secara jujur, mencerminkan apa yang seharusnya disajikan atau diharapkan secara wajar.

2. Dapat Diverifikasi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diverifikasi, dan hasil pengujian oleh pihak yang berbeda secara berulang menunjukkan kesimpulan yang konsisten dan tidak berbeda secara signifikan.

3. Netralis

Informasi dalam laporan keuangan bersifat netral, mengacu pada kebutuhan umum, dan tidak memihak pada kepentingan pihak tertentu

c. Dapat Dibandingkan

Kebergunaan informasi dalam laporan keuangan dapat ditingkatkan secara signifikan jika informasi tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan dari periode sebelumnya atau dengan laporan keuangan dari entitas pelaporan lain secara umum. Perbandingan ini bisa dilakukan baik secara internal, ketika entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun, maupun

secara eksternal, ketika entitas lain menerapkan kebijakan akuntansi serupa. Jika sebuah entitas pemerintah memperbaiki kebijakan akuntansinya dibandingkan dengan kebijakan yang sebelumnya diterapkan, perubahan tersebut harus dijelaskan pada periode perubahan tersebut.

d. Dapat Dipahami

Informasi dalam laporan keuangan harus dapat dimengerti dengan baik oleh pengguna dan disajikan dalam bentuk serta istilah yang sesuai dengan pemahaman mereka tentang kegiatan dan lingkungan operasional entitas pelaporan.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2

### Judul Penelitian Terdahulu

No	Judul, Nama Peneliti, Tahun	Metode	Hasil Penelitian
1.	Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Dalam Meningkatkan Koordinasi Pembangunan Di Daerah (Studi Tentang Penerapan SIPD Pada Bappeda Kota Bengkulu). (Dione & Faradina, 2020)	Kualitatif	Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal berikut: 1) Bappeda Kota Bengkulu berhasil dalam menjalankan proses komunikasi dengan efektif, terlihat dari penyebaran informasi yang luas kepada semua SKPD di Kota Bengkulu. 2) Meskipun telah dilakukan upaya, sumber daya yang tersedia untuk mendukung implementasi kebijakan SIPD masih terbatas, baik dari segi jumlah maupun kualitas staf. Jumlah dan kualifikasi staf masih belum memadai. 3) Sikap dan perilaku para pelaksana masih kurang mendukung, karena terbatasnya anggaran dan insentif bagi mereka, terutama para Administrator yang terlibat dalam implementasi SIPD di Kota Bengkulu. 4) Struktur organisasi pelaksanaan SIPD sudah cukup jelas dengan keberadaan Tim Koordinasi Penerapan SIPD, namun kurangnya komitmen pimpinan terhadap pentingnya implementasi SIPD dan kurangnya kerjasama antar pelaksana di SKPD-SKPD mengakibatkan kurangnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan.

*Berlanjut ke hal 36*

No	Judul, Nama Peneliti, Tahun	Metode	Hasil Penelitian
2.	The Moderating Role Of The Government Internal Control System On Factors Influencing The Quality Of Local Government Financial Reports. (A. Putri & H. Simanjuntak, 2023)	Kuantitatif	Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh kemampuan serta keahlian sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi yang berlaku, serta pengimplementasian sistem akuntansi keuangan daerah.
3.	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. (Tumija et al., 2023)	Kualitatif	Berdasarkan dari uraian hasil data dan fakta yang ditemukan adapun kesimpulan diuraikan sebagai berikut: 1) Penerapan SIPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Semarang, sudah dilaksanakan, hal ini dilihat dari empat dimensi yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, namun ada permasalahan pada dimensi Sumber Daya terutama pada indikator fasilitas sistem infomasi AKLAP, menu yang digunakan sudah ada namun belum bisa diakses. 2) Hambatan Penerapan SIPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Semarang antara lain a) pelatihan SIPD dari pemerintah pusat belum optimal; b) Server yang tersedia kurang kuat; dan c) terkait pengelolaan Keuangan diantaranya Akuntansi dan Pelaporan (Aklap) laporan Realisasi Anggaran, menunya sudah ada namun belum <i>balance</i> , belum bisa diakses, kemudian pengembalian LS Kas Umum belum sesuai. 3) Strategi dalam mengatasi

No	Judul, Nama Peneliti, Tahun	Metode	Hasil Penelitian
			<p>hambatan penerapan SIPD dalam dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Semarang yaitu strateginya adalah</p> <p>1) strategi SO (<i>Strenght-Opportunity</i>)</p> <p>2) strategi SC (<i>Strenght-Culture</i>)</p> <p>3) strategi AgC (<i>Agility-Culture</i>),</p>
4.	<p>Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Dalam Mengelola Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Wolokoli Kecamatan Bola Kabupaten Sikka). (Maria Luciani Anryck Da Ona, Henrikus Herdi, 2023)</p>	Kualitatif	<p>1. Berdasarkan hasil analisis, Desa Wolokoli pada teori telah mengacu pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 dalam pengelolaan dana desa. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat program-program yang belum berjalan atau terealisasi sepenuhnya, serta dalam tahap pelaksanaan terkendala oleh kualitas SDM yang belum memadai. Sehingga, Desa Wolokoli belum sepenuhnya mandiri dalam pengelolaan dana desa.</p> <p>2. Implementasi Sistem Pengendalian Internal di Desa Wolokoli telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang belum diterapkan dengan baik, yang mengakibatkan kesan kurang transparan dalam pelaksanaannya.</p>

No	Judul, Nama Peneliti, Tahun	Metode	Hasil Penelitian
5.	Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru. (Vitriana et al., 2022)	Kualitatif	Dari analisis data yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi SIPD di BPKAD Kota Pekanbaru belum mencapai tingkat optimal. Implementasi ini dinilai berdasarkan teori implementasi Edward III yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya manusia, sikap (disposisi), dan struktur birokrasi. Ditemukan bahwa komunikasi yang belum efektif dan sikap yang kurang mendukung dari para implementator menjadi kendala utama dalam penerapan SIPD. Komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilakukan secara online melalui platform seperti Zoom, yang mengakibatkan kurangnya kejelasan dalam penyampaian informasi. Penggunaan SIPD di BPKAD Kota Pekanbaru dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah juga belum optimal, terlihat dari pencapaian yang baru sampai tahap penganggaran, menunjukkan bahwa belum sepenuhnya diterapkan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Proses adaptasi juga menghadapi kesulitan karena perbedaan sistem yang digunakan oleh bidang anggaran, akuntansi, dan pelaporan, sehingga integrasi belum berjalan dengan baik. Sebagai hasilnya, penggunaan SIPD di BPKAD Kota Pekanbaru dalam pengelolaan

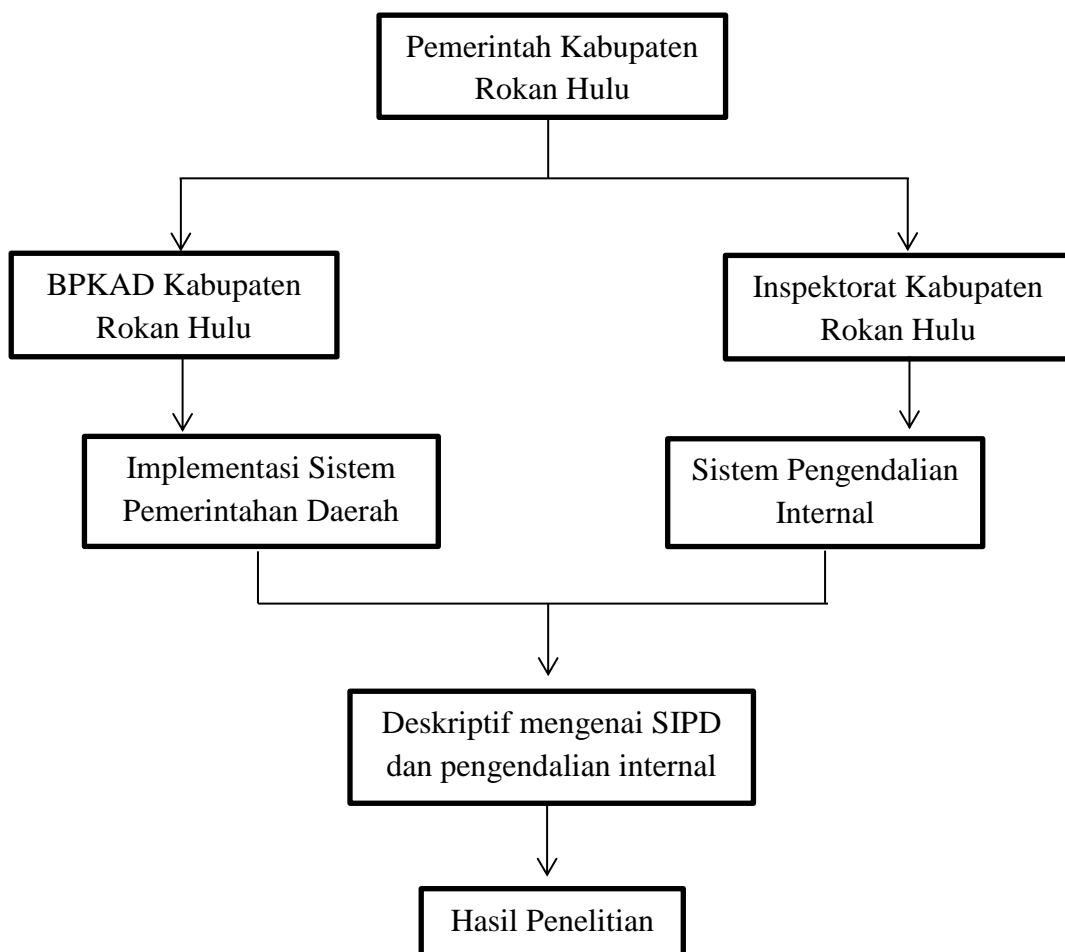
No	Judul, Nama Peneliti, Tahun	Metode	Hasil Penelitian
			<p>keuangan daerah belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan.</p> <p>Keunggulan SIPD terletak pada cakupan yang luas dan integrasinya di seluruh Indonesia, memungkinkan data dari setiap instansi pemerintah direkam dalam satu server dan informasi yang dihasilkan saling terhubung. Penerapan SIPD pada setiap instansi pemerintah juga membantu dalam menyelaraskan penggunaan sistem, memudahkan setiap instansi dalam menginput perencanaan dan penganggaran, serta mendorong proses pemerintahan yang lebih inovatif dan kreatif. Ini menunjukkan bahwa SIPD terkoneksi dengan semua instansi di Indonesia, sedangkan aplikasi SIPKD memiliki cakupan yang lebih terbatas, hanya digunakan oleh OPD di daerah-daerah tertentu yang menerapkannya.</p>

### 2.3 Kerangka Konseptual

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Pengendalian Internal pada Laporan Keuangan Daerah. Salah satu contoh implementasi teknologi informasi dalam konteks ini adalah melalui penggunaan SIPD oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana SIPD dan pengendalian internal diterapkan di Pemerintah Daerah, khususnya di

Kabupaten Rokan Hulu. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan observasi langsung untuk mendapatkan pemahaman yang alami dari situasi lapangan (Natural Setting).

Data penelitian akan dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis. Analisis ini mencakup pengorganisasian data, pemahaman untuk mengidentifikasi tema, dan interpretasi yang terkait dengan teori/konsep serta temuan dari penelitian sebelumnya. Berdasarkan pendekatan ini, kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1.1 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang berlokasi di Jl. Komp. Perkantoran Pemda Rohul, Pematang Berangan, Kec. Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Riau 28558. Durasi penelitian akan berlangsung selama 3 bulan, mulai dari bulan Maret hingga bulan Mei 2024.

#### **1.2 Informan Penelitian**

Sampel, menurut Sugiyono (2013), dapat didefinisikan sebagai sebagian kecil dari keseluruhan jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Dalam menentukan informan penelitian, sampel diambil sebagai sebagian kecil dari keseluruhan populasi dengan karakteristik yang relevan. Proses pengukuran sampel merupakan tahap penting dalam menentukan jumlah sampel yang diambil. Representativitas sampel, yang mencerminkan karakteristik populasi secara keseluruhan, menjadi perhatian utama dalam penelitian ini (Ramadhan, 2017).

Penelitian kualitatif tidak mengikatkan diri pada jumlah sampel minimum dan umumnya menggunakan jumlah sampel yang relatif kecil. Namun, penentuan jumlah informan harus memenuhi dua persyaratan utama: kecukupan dan kesesuaian dengan tema penelitian, seperti yang dijelaskan oleh (Martha & Kresno, 2016).

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, di mana informan atau narasumber dipilih berdasarkan tujuan tertentu yang sesuai dengan tema penelitian karena mereka dianggap memiliki informasi

yang relevan dan diperlukan (Sugiyono, 2018). Dalam hal ini peneliti menetapkan bahwa pihak yang akan menjadi informan penelitian terdiri dari Inspektorat, penanggungjawab SIPD bagian laporan keuangan, Sekretaris BPKAD, Ka. Sub Bag ADM dan Kepegawaian BPKAD dan Perencana Muda BPKAD. Adapun informan dalam penelitian ini terdapat pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Informan Penelitian**

No	Bagian	Nama Informan	Jumlah Informan
1.	Inspektorat	Kesy Kusvio, S.T	1
2.	Penanggungjawab SIPD Bagian Laporan keuangan	Emra Syahnur, SE., Ak	1
3.	Sekretaris BPKAD	Asikin, SE, MM	1
4.	Ka. Sub Bag ADM dan Kepegawaian BPKAD	Salehan, SH	1
5.	Perencana Muda BPKAD	Ira Gusmawati, SE, Ak. CA	1
<b>Jumlah informan</b>			<b>5</b>

*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu*

### 1.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif *case studies*. Menurut Creswell dalam Sugiyono (2018), penelitian kualitatif dengan studi kasus melibatkan eksplorasi mendalam terhadap program, kejadian, proses, atau aktivitas tertentu yang melibatkan satu atau lebih individu. Sugiyono (2017), mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai pendekatan berbasis postpositivisme yang digunakan untuk memahami kondisi objek secara alamiah. Dalam konteks ini, pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan fakta, keadaan,

atau gejala yang terkait dengan implementasi SIPD dan pengendalian internal di instansi pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer, yang diperoleh langsung dari wadah atau entitas terkait. Data ini diperlukan untuk menganalisis penerapan aplikasi SIPD dan pengendalian internal. Data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan narasumber. Selain itu, data sekunder juga digunakan, yang mencakup informasi dari berbagai sumber seperti dokumen, literatur, dan hasil penelitian terkait lainnya yang relevan dengan topik penelitian dan instansi terkait.

#### **1.4 Teknik Pengambilan Data**

Teknik pengambilan data, menurut Lofland seperti yang dikutip dalam (Moleong, 2005), mencakup penggunaan kata-kata dan tindakan sebagai sumber data utama dalam penelitian kualitatif, sementara data tambahan dapat melibatkan dokumen dan sumber informasi lainnya. Teknik pengumpulan data terkait implementasi SIPD dan pengendalian internal pada laporan keuangan pemerintah daerah akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

##### **1. Observasi**

Menurut Mulyadi (2014), observasi merupakan kegiatan pengumpulan data secara alamiah yang akan digunakan dalam penelitian ilmiah. Observasi digunakan dengan tujuan untuk melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap gejala-gejala yang muncul pada objek penelitian saat berada dalam keadaan atau situasi alami atau sebenarnya. Pengamatan mencakup aspek-aspek seperti kondisi keadaan sarana dan prasarana yang ada, proses akuntansi, serta hambatan-

hambatan yang mungkin timbul dalam implementasi SIPD, sistem pengendalian internal dan kondisi lain yang dapat memberikan dukungan terhadap hasil penelitian. Tujuan dari penggunaan observasi ini adalah untuk mendapatkan data yang lebih mendekati realitas, dengan membandingkan hasil wawancara dengan kondisi yang sebenarnya.

## **2. Wawancara**

Menurut Nazir (2014), wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide*. Metode wawancara digunakan dengan cara melakukan pertanyaan langsung kepada pihak yang terlibat dan memiliki keterkaitan langsung, dengan tujuan untuk memperoleh penjelasan mengenai kondisi dan situasi yang sebenarnya. Dalam konteks penelitian ini, informan dipilih dari individu yang dianggap memiliki pemahaman kunci yang diperlukan di dalam wilayah penelitian. Jumlah pegawai yang diwawancarai disesuaikan dengan ketersediaan yang dapat memberikan jawaban yang relevan terhadap pertanyaan penelitian. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Bagian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat, penanggungjawab SIPD bagian penatausahaan, penanggungjawab SIPD bagian anggaran, penanggungjawab SIPD bagian akuntansi dan umum.

## **3. Studi Dokumentasi**

Menurut Arikunto & Suharsimi (2010), dokumentasi adalah metode yang dilaksanakan oleh peneliti untuk menyelidiki benda-benda tertulis seperti, buku,

dokumen, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat catatan harian dan sebagainya. Metode pengumpulan data ini akan dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mencatat beberapa laporan serta tinjauan literatur ilmiah. Dalam konteks ini, fokusnya adalah pada data yang terkait dengan penerapan SIPD dan pengendalian internal di pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Selain itu, pencarian data dilakukan melalui dokumen-dokumen dari instansi yang berkaitan dengan isu pokok dan materi penelitian, yang menjadi penunjang data penelitian dan tidak diperoleh melalui kegiatan observasi dan wawancara.

### **3.5 Definisi Operasional**

Menurut (Nurdin & Hartati, 2019) definisi operasional variabel adalah proses mendefinisikan variabel berdasarkan karakteristik yang diamati, yang memungkinkan peneliti untuk mengamati atau mengukur secara cermat suatu objek atau fenomena. Variabel mengacu pada entitas yang dapat memiliki berbagai bentuk, yang ditentukan oleh peneliti untuk diselidiki dengan tujuan memperoleh informasi dan membuat kesimpulan tentang entitas tersebut. Sugiyono (2013) mendefinisikan variabel penelitian sebagai atribut, sifat, atau nilai yang dimiliki oleh orang, objek, atau kegiatan yang bervariasi, yang kemudian ditentukan oleh peneliti untuk dianalisis dan ditarik kesimpulannya. Definisi operasional variabel ditampilkan dalam Tabel 3.2 berikut ini:

**Tabel 3.2**  
**Operasional Variabel**

<b>Fokus Penelitian</b>	<b>Indikator</b>	<b>Definisi Operasional</b>
Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	Komunikasi	Komunikasi merupakan elemen kunci dalam mencapai tujuan implementasi kebijakan publik. Keberhasilan implementasi bergantung pada pemahaman yang jelas dari para pembuat keputusan mengenai tugas yang harus mereka lakukan.
	Sumber Daya	Dalam konteks organisasi, para pelaksana kebijakan yang memadai dalam jumlah dan kualifikasi akan mendukung keberhasilan implementasi. Informasi juga memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan.
	Sikap (Disposisi)	Sikap para pelaksana kebijakan juga memengaruhi keberhasilan implementasi, di mana penerimaan dan pelaksanaan kebijakan tanpa paksaan menunjukkan keberhasilan dalam implementasi tersebut.
	Struktur Birokrasi	Birokrasi, dengan struktur organisasinya yang khas, dapat membentuk platform untuk menjalankan kebijakan tertentu dengan standar operasional yang jelas dan fragmentasi yang dikelola.
	Sumber: George C. Edward III (Zulfikar Fikri Amri, 2022)	
Pengendalian Internal	Lingkungan Pengendalian	Lingkungan pengendalian yang menghasilkan perilaku positif dan kondusif dalam pelaksanaan pengendalian internal di lingkungan kerja
	Penilaian Risiko	Kejadian yang mungkin terjadi dan dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah
	Kegiatan Pengendalian	Tindakan yang perlu dilakukan guna mengatasi risiko, serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan untuk memastikan efektivitas tindakan penanggulangan risiko
	Informasi dan Komunikasi	Penyampaian informasi dengan tepat waktu dan efektif dalam implementasi pengendalian internal
	Pemantauan pengendalian internal	Penilaian kualitas kinerja sistem pengendalian internal

*Berlanjut ke hal 47*

<b>Fokus Penelitian</b>	<b>Indikator</b>	<b>Definisi Operasional</b>
	Sumber: Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008	
Laporan Keuangan Pemerintah	Relevan	Informasi yang terkandung didalamnya mampu memengaruhi keputusan pengguna, membantu mengevaluasi, dan meramalkan peristiwa masa depan
	Andal	Keandalan informasi dalam laporan keuangan terlihat dari ketiadaan interpretasi yang menyesatkan, mampu menyajikan fakta dengan jujur dan dapat diverifikasi
	Dapat Dibandingkan	Informasi dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya
	Dapat Dipahami	Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan harus mudah dipahami dengan baik oleh pengguna
	Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010	

### 3.6 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri menjadi instrumen utama penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrumen utama yang digunakan. Oleh karena itu, perlu dilakukan validasi terhadap peneliti sebagai instrumen untuk menilai kesiapan mereka dalam melaksanakan penelitian di lapangan. Validasi ini melibatkan penilaian terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, pemahaman yang mendalam terhadap bidang yang diteliti, dan kesiapan peneliti dari segi akademis dan logistik (Sugiyono, 2017).

Pada proses pengumpulan data dan informasi yang diperlukan melalui wawancara, memerlukan instrumen pendukung seperti pedoman wawancara, *tape recorder*, kamera dan lainnya. Selain itu, untuk melengkapi instrumen juga diperlukan catatan lapangan, yaitu catatan tertulis tentang apa yang didengar,

dilihat, dialami dan difikirkan selama proses pengumpulan data. Salah satu instrumen dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara. Adapun pedoman wawancara berupa pertanyaan yang akan diajukan kepada informan adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Panduan Wawancara**

Fokus Penelitian	Indikator	Sub indikator
Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bagaimana sistem penyaluran komunikasi yang diterapkan BPKAD Rokan Hulu?</li> <li>b. Apakah transmisi yang diterapkan sudah baik dan dan menimbulkan suatu implementasi yang baik pula?</li> <li>c. Apakah komunikasi yang diterima oleh para pelaksana sudah jelas dan tidak menimbulkan makna ganda?</li> <li>d. Apakah BPKAD sudah konsisten dan jelas dalam memberikan informasi untuk kemudian dapat diterapkan atau bernilai praktis?</li> </ul>
	Sumber Daya	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bagaimana kebijakan yang dilakukan BPKAD untuk meningkatkan kemampuan dan jiwa kepemimpinan kepada para pegawai agar kompeten dalam bidang tugasnya?</li> <li>b. Apakah informasi yang disampaikan oleh BPKAD telah memberikan dua bentuk informasi yaitu informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan dan informasi berkaitan data kepatuhan yang sudah ditetapkan?</li> <li>c. Bagaimana wewenang yang diberikan BPKAD kepada para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan?</li> <li>d. Apakah fasilitas fisik berupa sarana dan prasarana sudah memadai untuk mendorong kegiatan pelaksana kebijakan?</li> </ul>
	Sikap (Disposisi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bagaimana proses dalam pengangkatan birokrat, disposisi agar pelaksana yang terpilih adalah orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan?</li> <li>b. Apakah insentif yang diberikan sudah sesuai dan memberikan pengaruh pada tindakan para</li> </ul>

*Berlanjut ke hal 49*

<b>Fokus Penelitian</b>	<b>Indikator</b>	<b>Sub indikator</b>
		pelaksana kebijakan untuk melaksanakan perintah dengan baik?
	Struktur Birokrasi	<p>a. Apakah <i>Standar Operating Prosedure</i> (SOP) telah diterapkan dengan baik sehingga pelaksana kebijakan dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar yang ditetapkan?</p> <p>b. Apakah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan (fragmentasi) telah diterapkan dengan baik?</p>
Pengendalian Internal	Lingkungan Pengendalian	<p>a. Apakah pekerjaan para pekerja sudah berlandaskan pada norma-norma atau aturan yang ada untuk kelancaran kegiatan?</p> <p>b. Apakah para pegawai harus mempunyai sifat-sifat kepemimpinan?</p> <p>c. Apakah kegiatan sudah didukung dengan struktur organisasi yang sesuai dengan fungsinya?</p> <p>d. Apakah para pegawai sudah mengerjakan tugas-tugasnya sesuai dengan <i>job description</i> dan tanggung jawabnya?</p> <p>e. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan untuk kelancaran kegiatan para pekerja?</p> <p>f. Bagaimana budaya organisasi di dalam lingkungan kegiatan pekerjaan?</p>
	Penilaian Risiko	a. Bagaimana antisipasi terhadap masalah yang akan terjadi pada tempat kerja?
	Kegiatan Pengendalian	<p>a. Apakah para pekerja mengulas kembali kegiatan yang telah dilaksanakan agar tidak terjadi kesalahan?</p> <p>b. Apakah kegiatan internal dilakukan secara berkala di tempat kerja?</p> <p>c. Apakah ada antisipasi agar kegiatan berjalan dengan lancar dan informasi dapat dipastikan keakuratannya?</p> <p>d. Bagaimana sistem keamanan untuk barang berharga?</p> <p>e. Apakah penyimpanan semua file-file kegiatan pekerjaan sudah dijalankan dengan baik?</p>
	Informasi dan Komunikasi	a. Apakah terdapat pembaharuan sistem menjadi lebih baik lagi agar dapat menunjang kegiatan pekerjaan?

<b>Fokus Penelitian</b>	<b>Indikator</b>	<b>Sub indikator</b>
	Pemantauan internal	a. Bagaimana sistem keamanan membantu meminimalisir terjadinya hal yang tidak diinginkan? b. Bagaimana sistem pengambilan keputusan yang tepat untuk rekomendasi hasil yang telah didapat?

Pada penelitian ini juga penulis membuat panduan pertanyaan khusus yang memungkinkan jawabannya sudah ditentukan terlebih dahulu. Pilihan jawaban yang diberikan adalah Ya/Sudah dan Tidak/Belum. Metode ini dilakukan peneliti untuk berguna untuk pengambilan kesimpulan dalam melihat bagaimana kondisi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Adapun pedoman pertanyaan wawancara khusus tersebut dapat dilihat pada tabel 3.4 sebagai berikut:

**Tabel 3.4**

**Panduan Wawancara Khusus**

<b>No</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Sudah</b>	<b>Belum</b>
1.	Apakah sistem akuntansi yang diterapkan oleh BPKAD sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)?		
2.	Apakah penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah yang diterapkan oleh BPKAD sudah baik?		
3.	Apakah transaksi keuangan dilakukan dengan analisis transaksi/identifikasi transaksi?		
4.	Apakah BPKAD melaksanakan pengindentifikasian terhadap pencatatan?		
5.	Apakah setiap transaksi keuangan didukung oleh bukti transaksi?		

No	Pertanyaan	Sudah	Belum
6.	Apakah BPKAD melakukan pengklasifikasian terhadap transaksi yang terjadi?		
7.	Apakah BPKAD melakukan klasifikasi sesuai dengan pos masing-masing?		
8.	Apakah sistem pengendalian dilakukan dalam mengukur dan melaporkan pencatatan?		
9.	Apakah pembuatan laporan keuangan dilakukan setiap periode akuntansi?		
10.	Apakah pelaporan laporan keuangan dilakukan secara konsisten dan periodik?		
11.	Apakah laporan keuangan menyediakan informasi yang dapat mengoreksi aktivitas keuangan dimasa lalu?		
12.	Apakah laporan keuangan menyediakan informasi yang mampu memprediksi masa yang akan datang?		
13.	Apakah penyajian laporan keuangan sudah tepat waktu sesuai periode akuntansi?		
14.	Apakah laporan keuangan menghasilkan informasi yang lengkap mencakup semua informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan?		
15.	Apakah laporan keuangan menghasilkan informasi yang wajar dan jujur?		
16.	Apakah informasi laporan keuangan jika diuji oleh pihak yang berbeda akan mewujudkan simpulan yang berbeda?		
17.	Apakah informasi laporan keuangan berpihak pada kebutuhan pihak tertentu?		
18.	Apakah laporan keuangan menghasilkan informasi yang dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya?		
19.	Apakah laporan keuangan menghasilkan informasi yang dapat dibandingkan dengan entitas lain yang menerapkan		

No	Pertanyaan	Sudah	Belum
	kebijakan akuntansi yang sama?		
20.	Apakah informasi laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipahami dengan jelas?		
21.	Apakah laporan keuangan yang dihasilkan oleh BPKAD sudah disajikan dalam bentuk dan istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna?		
22.	Apakah BPKAD mengikuti suatu kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan?		
23.	Apakah akuntabilitas dan transparansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan yang ada?		
24.	Apakah informasi laporan keuangan yang dihasilkan handal, dapat dipercaya?		

### 3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data, seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2018), merupakan proses sistematis untuk mengorganisir dan menyusun data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Proses ini mencakup pengelompokan data ke dalam kategori-kategori yang relevan, penjelasan detail dari setiap unit data, penyusunan sintesis, pembentukan pola, pemilihan elemen yang signifikan, dan penyimpulan kesimpulan. Tujuannya adalah agar hasil analisis dapat dipahami dengan jelas oleh peneliti dan pihak lain yang tertarik.

Metode analisis yang diterapkan dalam penelitian ini untuk menganalisis data yang dikumpulkan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan data atau kejadian secara mendalam dan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan fakta, fenomena, dan situasi yang teramati

selama penelitian. Hasil analisis diterjemahkan dalam bentuk teori atau interpretasi yang relevan dengan konteks yang sedang diteliti.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode komparatif, yang melibatkan perbandingan jawaban dari responden. Hasil analisis ini diungkapkan dalam bentuk angka yang diinterpretasikan dalam narasi, dihitung, dan dibandingkan dengan nilai yang diharapkan, kemudian disajikan dalam bentuk persentase.

Data hasil observasi dalam penelitian ini dikumpulkan menggunakan pertanyaan tertutup dengan opsi jawaban Ya/Sudah dan Tidak/Belum. Berdasarkan jawaban yang diperoleh dari responden, dilakukan analisis statistik menggunakan rumus Dean J. Champion. Hasil analisis ini digunakan untuk mendukung proses penarikan kesimpulan dengan mengklasifikasikan nilai presentase sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
**Klasifikasi Kriteria Nilai Presentasi**

Presentase	Kriteria
0% - 25%	Menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pertanggungjawaban tidak baik
25% - 50%	Menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pertanggungjawaban kurang baik
50% - 75%	Menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pertanggungjawaban cukup baik
75% - 100%	Menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pertanggungjawaban sangat baik

*Sumber: Dean J. Champion (1990) diakses 20 Maret 2024*

Untuk menghitung persentase menggunakan rumus Dean J. Champion berikut ini:

$$\text{Presentase} = \frac{\sum \text{Jumlah Jawaban Iya}}{\text{Jumlah Jawaban Tidak}} \times 100\%$$

Dari rumus tersebut, akan dihitung hasil persentase dari hasil wawancara yang didapat dari 4 responden yang dilakukan pada saat penelitian.

Miles et al., (2018), menyatakan bahwa selama proses pengumpulan data, peneliti berada dalam dinamika antara merenungkan data yang telah ada dan merancang strategi untuk mengumpulkan data tambahan. (Miles et al., 2018) mengidentifikasi tiga tahap dalam analisis data, yakni:

#### 1. Reduksi Data

Data yang dikumpulkan dari lapangan, terutama laporan keuangan, membutuhkan analisis melalui proses reduksi data. Reduksi data melibatkan rangkuman, pemilihan elemen-elemen kunci, penekanan pada aspek-aspek penting, identifikasi pola tema, serta penghapusan informasi yang tidak relevan dari analisis.

#### 2. Penyajian Data

Setelah melalui proses reduksi data, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti dalam bentuk uraian, ringkasan, diagram, serta hubungan antara kategori dan jenisnya.

#### 3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif, sebagaimana dijelaskan oleh pendekatan Miles dan Huberman, adalah menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi. Kesimpulan awal yang diperoleh bersifat provisional dan bisa berubah seiring dengan penemuan tambahan. Proses verifikasi penting untuk memastikan keakuratan serta validitas kesimpulan yang diambil dari data kualitatif tersebut.